

Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pada Kantor Dispenda Kabupaten Jeneponto

Analysis of Regional Financial Performance at the Jeneponto Regency Dispenda Office

Hainun Putri Handayani, Arifuddin Manne, Syamsuddin Jafar

Pogram Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bosowa

*Correspondent author email: hainunputri16@gmail.com

Diterima: 11 Mei 2023 / Disetujui: 30 Agustus 2023

Abstrak: Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis kinerja keuangan daerah pada Kantor Dispenda Kabupaten Jeneponto melalui analisis menggunakan rasio keuangan kemandirian, efektivitas, efesiensi, aktivitas dan pertumbuhan. Dalam penelitian ini, teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif pendekatan kuantitatif yang dilakukan dengan mengumpulkan data yang diterima dari Kantor Dispenda Kabupaten Jeneponto berupa data-data jumlah anggaran pendapatan, realisasi penerimaan pajak daerah Kantor Dispenda Kabupaten Jeneponto sehingga memberikan gambaran yang cukup jelas untuk penulis menganalisis serta membandingkan dengan teori yang ada. Hasil penelitian menunjukkan Rasio Kemandirian pada Kantor Dispenda Kabupaten Jeneponto menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan dari pemerintah pusat mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi. Rasio Efektivitas pada Kantor Dispenda Kabupaten Jeneponto termasuk dalam tiga kategori yaitu cukup efektif, tidak efektif dan kurang efektif. Rasio Efesiensi pada Kantor Dispenda Kabupaten Jeneponto menunjukkan hasil yang sangat efisien. Rasio Aktivitas pada Kantor Dispenda Kabupaten Jeneponto belum mendominasi pada rasio belanja daerah. Rasio Pertumbuhan pada Kantor Dispenda Kabupaten Jeneponto menunjukkan hasil yang bernilai negatif karena menurunnya pendapatan yang diterima dari periode sebelumnya ke periode selanjutnya..

Kata Kunci: Kinerja Keuangan, Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Efesiensi, Rasio Aktivitas, Rasio Pertumbuhan, Jeneponto

Abstract: The aim of the research is to analyze regional financial performance at the Jeneponto Regency Dispenda Office through analysis using financial ratios of independence, effectiveness, efficiency, activity and growth. In this research, the analysis technique used is descriptive analysis, a quantitative approach, which was carried out by collecting data received from the Jeneponto Regency Dispenda Office in the form of data on the amount of the income budget, the realization of regional tax revenues from the Jeneponto Regency Dispenda Office, thus providing a clear enough picture for the author to analyze. and compare with existing theories. The results of the research show that the Independence Ratio at the Jeneponto Regency Dispenda Office shows that the level of regional dependence on assistance from the central government is close to being able to carry out autonomous affairs. The effectiveness ratio at the Jeneponto Regency Dispenda Office is included in three categories, namely quite effective, ineffective and less effective. The Efficiency Ratio at the Jeneponto Regency Dispenda Office shows very efficient results. The activity ratio at the Jeneponto Regency Dispenda Office does not yet dominate the regional expenditure ratio. The Growth Ratio at the Jeneponto Regency Dispenda Office shows negative results due to the decrease in income received from the previous period to the next period.

Keywords: Financial Performance, Independence Ratio, Effectiveness Ratio, Efficiency Ratio, Activity Ratio and Growth Ratio, Jeneponto



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

A. PENDAHULUAN

Reformasi keuangan daerah ditandai dengan diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan berlakunya Undang-Undang tersebut, telah terjadi perubahan yang cukup mendasar dalam pengelolaan daerah, termasuk dalam manajemen atau pengelolaan keuangan daerah. Tentunya untuk mencapai growth ekonomi yang tinggi, pemerintah harus memperbaiki kebijakan dan strategi dengan fokus terhadap sektor-sektor potensial dan strategis. Oleh karena itu, pembangunan harus dipantau dan dievaluasi. Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jeneponto merupakan salah

satu lembaga pemerintah. Instansi pemerintah daerah adalah badan yang disetujui oleh pemerintah pusat untuk menyelenggarakan dan mengatur kepentingan bangsa dan negara di daerahnya. Pemerintah daerah mengupayakan pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat luas dengan melaksanakan program pemerintahan daerah sendiri. Tujuannya adalah untuk mengembangkan setiap daerah dibawah kewenangan pemerintah daerah. Dengan Undang-undang Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004 adalah hak, wewenang dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus pembangunan seluruh pemerintahan dan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Pemerintah daerah memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Otonomi daerah akan berhasil disuatu daerah apabila kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangannya tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan, akuntabel dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jumlah APBD yang ditetapkan setiap tahun oleh peraturan daerah harus dikelola dengan baik, yang akan menunjukkan kemampuan keuangan operasional pemerintah. Kapasitas keuangan daerah pada era otonomi daerah dapat diukur dengan menggunakan analisis kinerja keuangan daerah.

Salah satu hal yang menjelaskan kinerja pemerintah daerah adalah laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan yang baik adalah yang mempunyai opini wajar tanpa pengecualian (OWTP), dimana pemerintah menyajikan laporan tahunan secara transparan dan tidak terdapat keganjilan dalam penyajian laporan keuangannya. Laporan keuangan disusun agar dapat mengetahui bahwa kinerja lembaga pemerintah daerah tersebut menurun atau mengalami peningkatan serta untuk menganalisis laporan keuangan daerah dibutuhkan alat analisis keuangan daerah, salah satu alat analisis yang dapat digunakan adalah rasio-rasio keuangan daerah yang meliputi rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi keuangan daerah, rasio aktivitas dan rasio pertumbuhan PAD. Kariyoto (2018) menyatakan bahwa manajemen keuangan merupakan integrasi dari science dan art yang mencermati, dan menganalisa tentang upaya seorang manajer financial dengan menggunakan seluruh SDM perusahaan untuk mencari funding, dan membagi funding dengan goal mampu memberikan laba atau welfare bagi para pemilik saham dan berkelanjutan (sustainability) bisnis bagi entitas ekonomi. M

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis kinerja keuangan daerah pada Kantor Dispenda Kabupaten Jeneponto melalui analisis menggunakan rasio keuangan kemandirian, efektivitas, efisiensi, aktivitas dan pertumbuhan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kantor Dispenda Kabupaten Jeneponto yang beralamat di Jalan Pahlawan No.3 Kel. Empoang, Binamu, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif pendekatan kuantitatif, yaitu metode yang digunakan untuk merumuskan perhatian terhadap masalah yang dihadapi. Data dikumpulkan, diolah dan dianalisis untuk memberikan informasi tentang permasalahan yang ada. Sugiyono (2017) menyatakan bahwa analisis statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

Untuk dapat memecahkan permasalahan dalam pembuktian kebenaran hipotesis yang diajukan sebagai bahan acuan penelitian, maka metode yang digunakan adalah 1) Analisis Deskriptif yaitu metode yang bertujuan mengubah kumpulan data mentah menjadi bentuk yang mudah dipahami, dalam bentuk informasi yang ringkas, dimana hasil penelitian beserta analisa tersebut akan menghasilkan suatu kesimpulan. 2) Analisis Kuantitatif yaitu metode yang bertujuan mengembangkan dan menggunakan model- model matematis dan teori-teori yang berkaitan dengan fenomena. Sugiyono (2017) menyatakan bahwa analisis statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Metode analisis data menggunakan metode deskriptif pendekatan kuantitatif yang merupakan metode yang digunakan untuk merumuskan perhatian terhadap masalah yang dihadapi, dimana data yang dikumpulkan, disusun dan dianalisis sehingga dapat memberikan informasi masalah yang ada.

Perehitungan rasio keuangan Kantor Dispenda Kabupaten Jeneponto dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut.

- Rasio Kemandirian = $\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pusat+Pinjaman}} \times 100\%$
- Rasio Efektivitas = $\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$
- Rasio Efisiensi = $\frac{\text{Biaya Memungut Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$
- Rasio Aktivitas = $\frac{\text{Total Belanja Oprasional}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$
- Rasio Pertumbuhan = $\frac{\text{Pendapatan Tahun } t - \text{Pendapatan Tahun } (t-1)}{\text{Pendapatan Tahun } (t-1)} \times 100\%$

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Haerunnisa *dalam* Arifuddin Mane (2018) kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri urusan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio kemandirian keuangan daerah Kantor Dispenda Kabupaten Jeneponto tahun 2019 memperlihatkan rasio kemandirian keuangan daerah sebesar 10,66% dan pada tahun 2020 sebesar 14,18% sedangkan pada tahun 2021 memperlihatkan rasio kemandirian keuangan daerah sebesar 13,16%. Apabila hal tersebut dikaitkan pada tingkat pola hubungan serta kemampuan daerah maka pada tahun 2019, 2020 dan 2021 rasio kemandirian keuangan daerah termasuk tingkat 0-25% dengan pola hubungan instruktif serta kemampuan daerah yang masih sangat rendah. Hal ini berarti rendahnya pendapatan pada tahun 2019 begitupun pada tahun 2020 dan 2021 rendahnya PAD ini disebabkan oleh rendahnya pajak daerah seperti pajak kendaraan, pajak angkutan mobil, pajak bahan bakar motor, pajak pemanfaatan dan pengambilan air permukaan, serta rendahnya pendapatan lain-lain daerah yang sah.

Tabel 1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kantor Dispenda Kabupaten Jeneponto

Tahun	PAD	Bantuan Pusat	Pinjaman	Rasio (%)	Keterangan
2019	37.926.971.000	35.567.629.435	0	10,66	Instruktif
2020	38.497.978.000	27.130.876.233	0	14,18	Instruktif
2021	46.070.044.000	34.987.973.317	0	13,16	Instruktif

Sumber: Data Primer Diolah 2022

Dilihat dari perhitungan di atas, rasio kemandirian keuangan daerah pada tahun 2019 menunjukkan bahwa daerah belum mampu mendanai kegiatan pemerintah dalam pembangunan, pelayanan kepada masyarakat dengan kontribusi sebesar 10,66%. Begitupun pada tahun 2020 daerah belum mampu membiayai diri sendiri dalam kegiatan pemerintah dengan kontribusi sebesar 14,18% dan tahun 2021 sebesar 13,16% yang berarti daerah belum mampu dalam membiayai diri sendiri baik dalam hal pelayanan masyarakat maupun pembangunan. Apabila dikaitkan dengan tingkat kapasitas daerah dan pola hubungan, maka kemandirian daerah akan berada pada level 0-25% pada tahun 2019, Begitupun dengan tingkat kemandirian daerah yang sangat rendah pada tahun 2020 dan 2021 dengan pola hubungan yang instruktif.

Pola hubungan instruktif adalah peran pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah tidak mampu mencapai otonomi keuangan daerah). Alasan pola hubungan instruktif keuangan daerah di Kantor Dispenda Kabupaten Jeneponto adalah karena pelayanan sosial masyarakat untuk pelayanan pemerintah, pembinaan dan pelaksanaan pelayanan sosial masih relatif kecil. Di sisi lain, potensi sumber pendanaan daerah terletak pada pemerintah pusat, sehingga ketergantungannya pada sumber pendapatan luar masih sangat tinggi. Berdasarkan hasil data analisis laporan keuangan mengenai aspek rasio kemandirian Kantor Dispenda Kabupaten Jeneponto termasuk dalam kategori 0- 25% artinya berada dalam pola hubungan yang instruktif. Hal ini mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat, karena pola hubungan yang instruktif menunjukkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah. Dengan kata lain tidak partisipatif

ditinjau dari aspek partisipatif laporan keuangan Kantor Dispenda Kabupaten Jeneponto. Kurangnya partisipasi secara tidak langsung mempengaruhi transparansi dan akuntabilitas kinerja lembaga keuangan Dispenda Kabupaten Jeneponto

Rasio Efektivitas PAD

Efektivitas PAD adalah kemampuan pemerintah daerah untuk mencapai pendapatan asli daerah yang diproyeksikan terhadap tujuan yang ditetapkan berdasarkan potensi daerah yang sebenarnya. Rasio efektivitas PAD Kantor Dispenda Kabupaten Jeneponto pada tahun 2019 termasuk kategori cukup efektif karena pajak daerah yang memiliki kontribusi yang besar pada pajak daerah tahun 2019 cukup terealisasi sesuai dengan yang telah dianggarkan. Di sisi lain, pada tahun 2020 pajak daerah yang memberikan kontribusi besar terhadap pajak daerah tahun 2020 tidak terealisasi sesuai anggaran sehingga tergolong tidak efektif. Dan tahun 2021 kurang efektif disebabkan karena pajak daerah kurang terealisasi sesuai anggaran yang telah ditetapkan Kantor Dispenda Kabupaten Jeneponto.

Tabel 2. Rasio Efektivitas PAD Kantor Dispenda Kabupaten Jeneponto

Tahun	Realisasi PAD	Target PAD	Rasio (%)	Keterangan
2019	35.567.629.435	37.926.971.000	93,78	Cukup Efektif
2020	27.130.876.233	38.497.978.000	70,47	Tidak Efektif
2021	34.987.973.317	46.070.044.000	75,94	Kurang Efektif

Sumber: Data Primer Diolah 2022

Dilihat dari uraian hasil perhitungan rasio efektivitas diatas Pendapatan Kantor Dispenda Kabupaten Jeneponto tahun 2019 sebesar 93,78% yang termasuk kategori cukup efektif, sedangkan tahun 2020 sebesar 70,47% yang termasuk dalam kategori tidak efektif dan pada tahun 2021 sebesar 75,94% yang berarti kurang efektif.

Analisis efektivitas memungkinkan kita untuk melihat sejauh mana realisasi pendapatan asli daerah dari tujuan yang ingin dicapai dalam periode tertentu. Tujuannya untuk mendorong realisasi pendapatan daerah dengan pencapaian target pendapatan asli daerah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kinerja Kantor Dispenda Kabupaten Jeneponto pada tahun 2019 cukup efektif dalam mengelola PAD karena nilai efektivitas menunjukkan 90%-99%. Sedangkan pada tahun 2020 tidak efektif dalam pengelolaan PAD karena persentase efektivitas menunjukkan angka <75% dan kurang efektif pada tahun 2021 karena menunjukkan angka 75%-89%. Semakin tinggi rasio efektivitas daerah menunjukkan kapasitas daerah yang efektif. Adapun faktor yang menyebabkan kinerja keuangan Kantor Dispenda Kabupaten Jeneponto tidak efektif dilihat dari rasio efektivitas PAD disebabkan karena pendapatan daerah masih dibawah dari yang dianggarkan sebelumnya. Dengan menurunnya rasio ini juga menunjukkan Kantor Dispenda Kabupaten Jeneponto dapat dikatakan memiliki kinerja keuangan yang kurang efektif dalam meningkatkan pendapatan daerah. Dari data yang dimiliki ternyata upaya untuk menghasilkan pendapatan tidak sesuai target. Hal ini disebabkan rendahnya penerimaan yang dihasilkan dari pendapatan dan belanja tidak maksimal pada tahun 2020.

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio efisiensi keuangan daerah dihitung dengan membandingkan biaya pemungutan pendapatan asli daerah dengan realisasi PAD yang ditetapkan. Rasio efisiensi keuangan daerah Kantor Dispenda Kabupaten Jeneponto sangat efisien. Dengan tingkat efisiensi tahun 2019 sebesar 1,26% dan pada tahun 2020 sebesar 1,31%, sedangkan tahun 2021 sebesar 1,25% dalam hal tingkat penggunaan biaya yang dikumpulkan di daerah untuk mengasalkan pendapatan, menunjukkan hasil yang positif karena semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja keuangan Kantor Dispenda Kabupaten Jeneponto meningkat atau termasuk dalam kategori sangat efisien. Ini merupakan bentuk penghematan anggaran dengan biaya yang kecil namun hasil yang maksimal.

Tabel 3. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Kantor Dispenda Kabupaten Jeneponto

Tahun	Biaya yang Memungut PAD	Realisasi PAD	Rasio (%)
2019	44.818.494.450	35.567.629.435	1,26
2020	35.648.223.460	27.130.876.233	1,31
2021	43.743.515.224	34.987.973.317	1,25

Sumber: Data Primer Diolah 2022

Berdasarkan data diatas bahwa efisiensi keuangan daerah Kantor Dispenda Kabupaten Jeneponto sangat efisien. Dengan tingkat efisiensi tahun 2019 sebesar 1,26% dan pada tahun 2020 sebesar 1,31%, sedangkan tahun 2021 sebesar 1,25% dalam hal tingkat penggunaan biaya yang dikumpulkan di daerah untuk menghasilkan pendapatan, menunjukkan hasil yang positif karena semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja keuangan Kantor Dispenda Kabupaten Jeneponto meningkat atau termasuk dalam kategori sangat efisien. Ini merupakan bentuk penghematan anggaran dengan biaya yang kecil namun hasil yang maksimal.

Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas menunjukkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dana untuk operasi dan belanja modal. Rasio aktivitas sebesar 35,24% pada tahun 2019 masih tergolong rendah ketika porsi belanja daerah tidak dominan, meskipun total belanja daerah yang cukup diperlukan untuk mendukung pembangunan daerah. 60% pada tahun 2020 dan 92% pada tahun 2021. Tidak ada patokan yang jelas untuk rasio ideal belanja operasional dan belanja modal terhadap APBD. Hal ini sebenarnya sangat dipengaruhi oleh dinamika kegiatan pembangunan dan besarnya investasi yang dibutuhkan untuk mencapai pertumbuhan yang diharapkan.

Tabel 4. Rasio Aktivitas Keuangan Daerah Kantor Dispenda Kabupaten Jeneponto

Tahun	Belanja Operaional	Belanja Daerah	Rasio (%)
2019	1.549.000	43.950.000	35,24
2020	20.000.000	33.573.300	60
2021	41.700.000	44.899.900	92

Sumber: Data Primer Diolah 2022

Rasio aktivitas sebesar 35,24% pada tahun 2019 masih tergolong rendah ketika porsi belanja daerah tidak dominan, meskipun total belanja daerah yang cukup diperlukan untuk mendukung pembangunan daerah. 60% pada tahun 2020 dan 92% pada tahun 2021. Tidak ada patokan yang jelas untuk rasio ideal belanja operasional dan belanja modal terhadap APBD. Hal ini sebenarnya sangat dipengaruhi oleh dinamika kegiatan pembangunan dan besarnya investasi yang dibutuhkan untuk mencapai pertumbuhan yang diharapkan.

Rasio Pertumbuhan PAD

Rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama periode anggaran, kinerja Keuangan APBDnya mengalami pertumbuhan secara positif atautkah negatif. Rasio pertumbuhan keuangan Kantor Dispenda Kabupaten Jeneponto tahun 2019 dan tahun 2020 sebesar 79,53% sedangkan tahun 2021 sebesar 70,88% tumbuh secara positif, karena jika rasio belanja daerah yang cukup besar lebih dari angka 50%. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan, semakin tinggi jumlah pendapatan daerah, belanja modal dan PAD, diikuti dengan semakin rendah biaya operasional, maka semakin positif pertumbuhannya. Artinya daerah tersebut telah mampu meningkatkan dan mempertahankan pertumbuhannya dari tahun ke tahun berikutnya.

Tabel 5. Rasio Pertumbuhan PAD Kantor Dispenda Kabupaten Jeneponto

Tahun	Pendapatan	Pendapatan (t-1)	Rasio (%)
2019	44.818.494.450	0	0
2020	35.648.223.460	44.818.494.450	79.33
2021	43.743.515.224	35.648.223.460	70.88

Sumber: Data Primer Diolah 2022

Sesuai hasil perhitungan yang diperoleh pada rasio pertumbuhan keuangan Kantor Dispenda Kabupaten Jeneponto tahun 2019 dan tahun 2020 sebesar 79,53% sedangkan tahun 2021 sebesar 70,88% tumbuh secara positif, karena jika rasio belanja daerah yang cukup besar lebih dari angka 50%. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan, semakin tinggi jumlah pendapatan daerah, belanja modal dan PAD, diikuti dengan semakin rendah biaya operasional, maka semakin positif pertumbuhannya. Artinya daerah tersebut telah mampu meningkatkan dan mempertahankan pertumbuhannya dari tahun ke tahun berikutnya.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kemandirian Kantor Dispenda Kabupaten Jeneponto tahun 2019 sebesar 10,66%, sedangkan pada tahun 2020 sebesar 14,18% dan pada tahun 2021 sebesar 13,16% hal ini berarti tingkat ketergantungan pada bantuan dari pemerintah pusat sehingga belum mampu dalam melaksanakan urusan otonomi. Efektivitas pendapatan Kantor Dispenda Kabupaten Jeneponto pada tahun 2019 termasuk dalam kategori cukup efektif karena berada pada angka 90%-99%, dan pada tahun 2020 termasuk dalam kategori tidak efektif karena masih dibawah 75%. Sedangkan pada tahun 2021 termasuk kategori kurang efektif karena berada pada persentase efektivitas 75%-89%. Efisiensi Kantor Dispenda Kabupaten Jeneponto tahun 2019 menunjukkan hasil sangat efisien, begitupun pada tahun 2020 dan 2021 berada pada kategori sangat efisien karena persentase efisiensi <60%, hal ini merupakan bentuk penghematan anggaran dengan biaya yang kecil, namun memaksimalkan hasil yang dicapai. Aktivitas Kantor Dispenda Kabupaten Jeneponto tahun 2019 sebesar 35,24% tergolong masih rendah. Walaupun masih relatif rendah dimana rasio belanja daerah tidak dominan, dan tahun 2020 sebesar 60% sedangkan tahun 2021 sebesar 92% pada pemerintah daerah yang berpenghasilan tinggi, lebih besar porsi belanja operasi dibandingkan dengan pemerintah daerah yang tingkat pendapatannya rendah. Pertumbuhan pendapatan Kantor Dispenda Kabupaten Jeneponto tahun 2019-2021 bernilai negatif dikarenakan menurunnya pendapatan yang diterima serta daerah yang bersangkutan belum mampu meningkatkan pertumbuhan dari periode ke periode selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Addhi, F (2019). Pengaruh Perputaran Kas, Perputaran Persediaan, dan Perputaran Piutang terhadap profitabilitas pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Doctoral dissertation, Universitas Darma Persada)
- Arota, P. S., Morasa, J., & Wokas, H. N. (2019). Analisis Rasio Arus Kas untuk Menilai Kinerja Keuangan pada PT. Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk 2014-2018. *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 7(3)
- Fernandes, A., Yunus, R., & Tamsil, T. (2020). Pengaruh Analisis Kinerja Keuangan pada Koperasi Ika Mala di Kabupaten Flores Timur. *Accounting Journal*, 1(3), 147-154
- Gowa, T. D. K., & Prasetya, A. Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Daerah di Era Haerunnisa. 2018. Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Kota Makassar. *Jurnal Ekonomi Bosowa*, Vol.4, No.002:44-55
- Handayani, F. (2021). Analisis Pengelolaan Keuangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Layz Cake and Bakery (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta)
- Lestari, D. Analisis Rasio Aktivitas dan Rasio Profitabilitas untuk Mengukur Kinerja Keuangan pada PT. Sepatu Bata, Tbk (Periode 2012-2016)
- Murtiningtyas, R. (2018). Pengaruh Likuiditas, Leverage, Pertumbuhan Penjualan, dan Ukuran Perusahaan terhadap Profitabilitas (Studi Empiris pada Perusahaan Farmasi yang terdaftar di BEI Tahun 2012-2016) (Doctoral dissertation, Universitas Mercu Buana Yogyakarta)
- Nadya Tricahya, P. R. I. L. L. I. A (2019). Analisis Rasio Likuiditas, Solvabilitas, dan Profitabilitas pada PT Astra Graphia Cabang Palembang (Doctoral dissertation, Politeknik Negeri Sriwijaya)
- Ningsih, Y., Diana, N., & Marwadi, M. C. (2020). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI 2016-2018). *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 9(10)
- Nisrina, A. N., Affandi, H. A., & Alghifari, E. S. (2020). Pengaruh Leverage dan Ukuran Perusahaan terhadap Profitabilitas dan Dampaknya pada Nilai Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2018) (Doctoral dissertation, Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpas)
- Niyati, W., & Lunis, I. (2019). Analisis Kinerja Keuangan dengan Menggunakan Metode Economic Value Added (EVA) pada PT. Adaro Energy Tbk. Periode 2011-2017. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan*

- (JIMAT), 10(1), 26-42
- Novianka, R., & Saleh, S. A. (2021). Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara Menggunakan Rasio Keuangan. *Indonesian Accounting Literacy Journal*, 1(3), 677-690
- Putri, I. N. (2018). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri "SMH" Banten)
- Ramdan, T., & Sufyani, M. A. (2019). Pengaruh Intellectual Capital, Kebijakan Dividen dan Kinerja Keuangan terhadap Nilai Perusahaan (Studi pada Perusahaan Jasa Sektor Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2017) (Doctoral dissertation, Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpas)
- Sitepu, R. K. (2020). Analisis Laporan Keuangan untuk Menilai Kinerja Keuangan pada Kopdit/cu "UNAM" Berastagi (Doctoral dissertation, Universitas Quality)
- Suryani, P., Cahyono, Y., & Utami, B. D. (2020). Pengaruh Motivasi dan Gaya Kepemimpinan terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Produksi di PT. Tuntex Garment Indonesia. *Journal of Industrial Engineering & Management Research*, 1(1b), 70-82
- Wulandari, R. (2019). Analisis Laporan Keuangan pada PT. Angkasa Pura II (Doctoral dissertation, Universitas Dharmawangsa)